



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Konflik Parkir di Sidoarjo, Ratusan Jukir Gelar Aksi Demo

Oleh: Januar Fahmi - Editor : Ria Enandini - 16 Nov 2022 -
13:54



Sejumlah masa aksi masih bertahan di depan pendopo Bupati Sidoarjo walau diguyur hujan

KBRN, Sidoarjo : Ratusan juru parkir di Sidoarjo gelar aksi demo. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait lebih memperhatikan nasib mereka.

Demo maraton yang digelar di depan gedung DPRD Sidoarjo dan Pendopo Bupati pada Rabu (16/11) ini menyampaikan beberapa point tuntutan antara lain, mempertahankan jumlah titik parkir dan menolak adendum pengelolaan parkir oleh pihak ketiga.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap mempertahankan 359 titik parkir yang saat ini dikurangi oleh pihak ketiga menjadi 87 titik. Kami juga menolak terkait rencana adendum oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang pengelolaan parkir di Sidoarjo," tegas Aziz selaku koordinator jukir di Sidoarjo.

Menurutnya, pemenang lelang dalam hal ini PT. ISS sebagai pihak ketiga merencanakan akan meng adendum nilai lelang pengelolaan parkir yang dimenangkan dengan nilai Rp. 32 miliar lebih.

Adendum itu didasari atas keberatannya pihak ketiga lantaran titik parkir yang dianggap tak sesuai nilai tersebut. Adendum itu tentu berdampak terhadap nasib sejumlah jukir yang selama ini mengantungkan hidupnya dari titik parkir yang semula 359 kini menjadi 87 titik.

 **Klikjatim.com**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kalau adendum dan pengurangan titik parkir itu tetap dilakukan kami akan turun lagi dan meminta pemkab Sidoarjo untuk memutus kerjasama dengan pihak ketiga," kata Aziz.

Pihaknya juga berharap Pemkab Sidoarjo memikirkan ulang pengelolaan parkir yang dikelola pihak ketiga, ia berharap pengelolaan parkir dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan (Dishub) atau alternatif lain yang tetap dinaungi oleh Dinas di Sidoarjo.

"Intinya para jukir meminta untuk adanya kesepakatan yang tak merugikan kedua belah pihak antara ISS dan jukir yang sudah lama di Sidoarjo," imbuhnya.

Aksi demo yang digelar sejak pagi itu akhirnya direspon oleh anggota DPRD Sidoarjo fraksi Demokrat, Agil Effendi. Ditegaskannya DPRD melalui komisi B secara tegas menolak rencana adendum pihak ketiga atau PT. ISS.

"Secara tegas kami DPRD dari komisi B menolak rencana adendum pihak ketiga selaku pengelola parkir. Kami juga meminta PT ISS dalam hal ini segera melakukan sosialisasi terkait harga tiket parkir yang masih banyak masyarakat belum mengetahui," jelas Agil.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga mengaku siap mengakomodir permintaan para jukir terkait mempertahankan 359 titik parkir. Pihaknya juga menyampaikan penolakan atas rencana adendum pihak ketiga.

"Kami terbuka dan selalu menampung permintaan para jukir. Terkait jumlah titik parkir dan para jukir silahkan di data dan diajukan ke Dishub akan kami terima," tandasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sudjalil Tegaskan DPRD Sidoarjo Selalu Bela Wong Cilik!

Aksi demo yang digelar sejak pagi itu akhirnya direspon oleh anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Sudjalil.

Pemerintahan
Rabu, 16 November 2022 16:03 WIB
Oleh **Heru Guntoro** Editor **Heru Guntoro**



Anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Sudjalil.

Sidoarjo, Gesuri.id - Ratusan juru parkir di Sidoarjo gelar aksi demo. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait lebih memperhatikan nasib mereka.

Aksi demo yang digelar sejak pagi itu akhirnya direspon oleh anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Sudjalil. Ditegaskannya DPRD melalui komisi B secara tegas menolak rencana adendum pihak ketiga atau PT. ISS.

"Secara tegas kami DPRD dari komisi B menolak rencana adendum pihak ketiga selaku pengelola parkir. Kami juga meminta PT ISS dalam hal ini segera melakukan sosialisasi terkait harga tiket parkir yang masih banyak masyarakat belum mengetahui," jelas Sudjalil.



Sudjalil juga menjelaskan bahwasanya Komisi B sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait masalah parkir di Sidoarjo, bahwasanya DPRD Sidoarjo selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Sidoarjo.

"Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Intinya, DPRD Sidoarjo selalu mengedepankan kepentingan "wong cilik" Tegas Sudjalil dari Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo.

Selain itu, Demo maraton yang digelar di depan gedung DPRD Sidoarjo dan Pendopo Bupati Rabu (16/11) ini menyampaikan beberapa point tuntutan antara lain, mempertahankan jumlah titik parkir dan menolak adendum pengelolaan parkir oleh pihak ketiga.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap mempertahankan 359 titik parkir yang saat ini dikurangi oleh pihak ketiga menjadi 87 titik. Kami juga menolak terkait rencana adendum oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang pengelolaan parkir di Sidoarjo," tegas Aziz selaku koordinator jukir di Sidoarjo.

Menurutnya, pemenang lelang dalam hal ini PT. ISS sebagai pihak ketiga merencanakan akan mengadendum nilai lelang pengelolaan parkir yang dimenangkan dengan nilai Rp. 32 miliar lebih.

Adendum itu didasari atas keberatannya pihak ketiga lantaran titik parkir yang dianggap tak sesuai nilai tersebut. Adendum itu tentu berdampak terhadap nasib sejumlah jukir yang selama ini mengantungkan hidupnya dari titik parkir yang semula 359 kini menjadi 87 titik.

"Kalau adendum dan pengurangan titik parkir itu tetap dilakukan kami akan turun lagi dan meminta Pemkab Sidoarjo untuk memutus kerjasama dengan pihak ketiga," kata Aziz.

Pihaknya juga berharap Pemkab Sidoarjo memikirkan ulang pengelolaan parkir yang dikelola pihak ketiga, ia berharap pengelolaan parkir dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan (Dishub) atau alternatif lain yang tetap dinaungi oleh Dinas di Sidoarjo.



"Intinya para jukir meminta untuk adanya kesepakatan yang tak merugikan kedua belah pihak antara ISS dan jukir yang sudah lama di Sidoarjo," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga mengaku siap mengakomodir permintaan para jukir terkait mempertahankan 359 titik parkir. Pihaknya juga menyampaikan penolakan atas rencana adendum pihak ketiga.

"Kami terbuka dan selalu menampung permintaan para jukir. Terkait jumlah titik parkir dan para jukir silahkan di data dan diajukan ke Dishub akan kami terima," tandasnya.

Heru Guntoro
Author





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIPERKETAT: Petugas Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan bus dengan tujuan pulau Bali yang berasal dari Terminal bus Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Amankan G20, Polresta Perketat Pengamanan Bus Tujuan Bali

SIDOARJO (BM) - Petugas Polresta Sidoarjo Jawa Timur memperketat pengamanan bus dengan tujuan pulau Bali yang berasal dari Terminal bus Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro di Sidoarjo, Senin mengatakan, polisi bersama TNI, Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait memperketat pengamanan bus tujuan Bali di Terminal Purabaya, Bungurasih, Waru, Sidoarjo. "Sampai saat ini tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan," ujarnya.

Ia mengatakan, beberapa hari se-

belumnya, para kru bus serta penumpang bus tujuan Bali diperiksa petugas keamanan sebagai antisipasi adanya barang atau benda berbahaya di dalam bus yang dapat mengganggu kamtibmas pelaksanaan KTT G20 di Bali. "Situasi kamtibmas di wilayah kami aman dan kondusif. Bahkan animo masyarakat, dalam hal ini penumpang bus juga antusias menyambut KTT G20," ujarnya.

Ia mengimbau kepada kru bus dan penumpang untuk selalu tertib guna menyukseskan KTT G20 dan tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan mengenakan masker apabila sedang tidak

enak badan.

Selain melakukan pengecekan di dalam bus, Kapolresta Sidoarjo mengecek kesiapan personel gabungan pengamanan Ops Puri Agung di Terminal Purabaya sebagai salah satu obyek vital di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Polresta Sidoarjo juga membuka Posko Kesehatan Ops Puri Agung di Terminal Purabaya, Bungurasih, Waru yang melayani cek kesehatan dan vaksinasi.

Selain itu, posko tersebut juga melakukan cek kesehatan kru, anggota yang melaksanakan pengamanan, masyarakat dan calon penumpang bus, khususnya bus tujuan Bali. (udi)

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro

Rekayasa Lalin Raya Porong Atasi Dampak Perbaikan Saluran

SIDOARJO (BM) - Rekayasa lalu lintas (lalin) di Jalan Raya Porong dilakukan sebagai dampak perbaikan saluran air (cross drain) guna mengurangi genangan air yang kerap terjadi di wilayah tersebut saat musim hujan.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo, Iptu Abdul Kholil mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan selama pengerjaan proyek tersebut berlangsung. "Sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dilakukan rekayasa di Jalan Raya Porong," ujarnya.

Ia mengatakan, kendaraan dari arah Surabaya ke Malang, mulai dari bundaran Tanggulangin diarahkan belok kanan ke Jalan Arteri Porong. Sementara itu dari arah Malang ke

Surabaya mulai dari Pos 6 dibelokkan ke kiri ke Jalan Arteri Porong.

"Bagi pengendara roda dua untuk sementara masih bisa melewati, namun sampai di lokasi perbaikan harus melakukan kontra flow," katanya.

Penjabat Pembuat Komitmen 3.6 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Jawa Timur dan Bali, Fahrudin sebelumnya mengatakan yang melakukan pekerjaan cross drain ini Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Pihaknya hanya melakukan monitoring pelaksanaannya.

"Yang melakukan pekerjaan PPLS, kami hanya monitoring, pelaksanaan pekerjaan selama 35 hari. Otomatis jalan tersebut ditutup dua arah," kata

Fahrudin.

Kondisi Jalan Raya Porong yang berbatasan langsung dengan tanggul penahan lumpur Lapindo setiap kali musim hujan kerap kali banjir. Meskipun tidak berlangsung lama, banjir yang melanda jalan tersebut sempat membuat arus lalu lintas sedikit tersendat. Beberapa unit pompa untuk mengurangi genangan air yang terjadi di jalan tersebut juga disiagakan secara permanen di sejumlah titik.

Jalan Raya Porong masih tetap menjadi pilihan pengendara baik dari Sidoarjo menuju ke Pasuruan ataupun sebaliknya. Karena jika harus menggunakan Jalan Arteri Porong pengendara harus memutar beberapa kilometer. (udi)



BM1ST

Ingatkan Pentingnya Toga

dr. Barbara Irawaty : Masyarakat Mandiri Atasi Kesehatan Keluarga

SIDOARJO - Tak heran kalau di setiap Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo terdapat gerobak display jamu, yang bisa dibeli pengunjung Puskesmas. Gerobak dari dinas kesehatan yang dikhususkan menjual makanan minuman olahan Taman Obat Keluarga (TOGA) yang mana didalamnya terbentuk Asman (asuhan mandiri). Seperti halnya terlihat di Puskesmas Gedangan, yang juga dilakukan penilaian masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 tahun 2022 ini.

Kegiatan yang dijadwalkan Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor S.Hum, atau yang akrab dipanggil Ning Sasha, menjadi salah satu tim kegiatan tersebut karena ada halangan tidak bisa hadir di Puskesmas Gedangan.

dr. Barbara Irawaty ratna mengatakan, sebetulnya kegiatan ini masih dalam kaitan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

"Disini menilai pemanfaatan gerobak Toga atau Asman ada MOU dengan kader Asman yakni 8 desa untuk dimanfaatkan. Seminggu dua kali mengisi gerobak tersebut dengan produk Mamin olahan, bisa minuman herbal, pusing, makanan, kripik yang bahan dasarnya toga," terang dr Ira biasa disapa.

Kalau untuk pembinaan

kelompok Asman itu terjadwal dan terencana dalam sebulan sekali petugas kami turun melakukan pembinaan ke kelompok Asman, sebulan sekali monev, selain itu kami ada kegiatan akupuntur dan pijat bayi yang mana kami mulai sudah berjalan di bulan November ini.

Harapan kami setidaknya membuat masyarakat sekitar kembali pada alam," Banyak sekali disekitar kita produk yang bermanfaat kesehatan yang bisa dihasilkan, dan kedua bisa membuat masyarakat mandiri, dalam mengatasi masalah kesehatan yang terjadi yang ada di dalam keluarganya sebelum dibawa ke faskes," pungkask dr Ira mantan kepala puskesmas Wonoayu tersebut.

Salah satu tim penilai dari dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo Farhiya menyampaikan, kegiatan ini rutin setiap tahun kita mengadakan lomba atau penilaian pemanfaatan dan pengolahan hasil taman (tanaman) obat keluarga. Saat ini ditambah dengan gerobak jamu, karena kita sudah membagikan gerobak jamu yang di manfaatkan di puskesmas.

"Ini sebagai sarana untuk memfasilitasi produk yang sudah dihasilkan oleh kelompok Asman di wilayah puskesmas dengan produk makanan dan minuman dari hasil olahan Toga (Tanaman

Obat Keluarga). Tadi yang kita sampaikan kepada salah satu peserta Asman adalah salah satunya rasanya, kedua adalah lebel (yang harus menggambarkan lebel yang menarik sehingga bisa dipasarkan," terangnya.

Masih kata Farhiya, kegiatan tujuan Asman itu selain untuk bisa menyehatkan masyarakat juga sebagai suatu ajang untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui UMKM. Dinas, terkait perizinan mudah sekali, bisa lewat link disini ada petugas kesatuan lingkungan yang nanti akan menilai produk-produk itu untuk perizinan. Perizinan yang berupa PIRT di dinas Kesehatan. Memang tidak semua produk itu berizin, ada produk yang masa simpannya lebih dari satu hari itu baru baru bisa PIRT.

"Untuk pemasarannya, ya satu itu kita bisa memberikan fasilitasi berupa gerobak itu. Biar dia bisa memasarkan, minimal ada tempat lagi untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat baik online maupun offline seperti ini. Karena Puskesmas ini tempat lalu lalang orang," pungkask Farhiya bagian kesehatan tradisional di dinas Kesehatan Sidoarjo bersama beberapa staf berlanjut meninjau ruang pelayanan kesehatan akupuntur.

Iin salah satu peserta kepada wartawan mengatakan bisa lebih memperkenalkan produk kita tanaman toga untuk kesehatan terutama didaerah kami Desa Punggul kan lokus stanting, jadi kita mengolah aneka olahan dari bahan kelor intinya kami berharap olahan ini bisa berkembang. Seperti produknya ada stik, es cream, kalau puding ini dari daun Telang.

"Semoga kegiatan ini tidak berhenti disini saja, muda mudahan bisa berkembang lagi, olahannya bisa lebih banyak lagi berkembang, artinya tidak ditingkat puskesmas saja, sementara olahan kita ini khususkan untuk posyandu dan posbindu," pungkask Iin Suryono yang juga istri Sekdes Punggul tersebut. ● Loe



Tim penilaian dinas Kesehatan Sidoarjo didampingi kepala puskesmas Gedangan, tinjau Asman dan gerobak jamu di Puskesmas Gedangan Rabu (16/11/22)



Bupati Muhdlor membuka Sosialisasi Pajak Daerah Tahun 2022, awal Januari lalu.

Pemkab Bebaskan Denda Sembilan Pajak Daerah

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) memberlakukan pembebasan denda sembilan jenis pajak daerah. Penghapusan sanksi administrasi ini dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-164.

Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo Nomor 188/549/438.1.1.3/2022. "Penghapusan sanksi administratif ini berlaku sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 mendatang," cetus Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, Rabu, (16/11).

Ari Suryono menjelaskan, bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2022, dapat membayar tanpa dikenakan sanksi administratif atau denda itu.

"Karena itu, selama adanya waktu pembebasan denda pajak itu diharapkan WP segera menyelesaikan kewajibannya dengan segera membayar pajak daerah yang menjadi tanggungannya itu," imbuh mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sidoarjo.

Sembilan jenis pajak daerah yang dilakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda ini, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Kalau tidak terdapat pembebasan sanksi administratif ini, WP yang belum melakukan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebesar 2 persen per bulan dari pokok pajak yang harus dibayarkan," beber Ari.

Karena itu, dengan adanya momentum pembebasan sanksi administratif ini, Ari Suryono menghimbau dan berharap WP bisa segera memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan pembebasan denda itu. Terutama bagi masyarakat agar segera melunasi utang pajaknya.

Ari menambahkan, pembayaran pajak daerah Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline. Seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank OCBC NISP, Alfamart, Indomaret, e-Commerce dan berbagai kanal lainnya.

"Selain itu yang terbaru tempat pembayaran pajak melalui BUMDes pada masing-masing desa atau kecamatan," pungkas Ari Suryono. (sta/rd)

CS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buruh Minta Menaker Keluarkan Permenaker UMP

JAKARTA - Penolakan serikat pekerja/buruh terhadap penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 dalam penetapan upah minimum provinsi/kabupaten (UMP/UMK) 2023 sudah bulat. Sebagai gantinya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah diberi dua opsi untuk landasan hukumnya.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia secara tegas menyebut, induk dari PP 36/2021, yakni Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, PP 36/2021 tidak dapat digunakan sebagai acuan penetapan UMP/UMK 2023.

Selain itu, penggunaan PP 36/2021 dinilai tidak relevan. Sebab, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tak adanya kenaikan upah dalam tiga tahun berturut-turut. Perhitungan dengan formula yang ada di PP 36/2021 tidak akan sanggup mendongkrak kembali penurunan tajam tersebut. Sebab, ketika PP 36/2021 yang dipakai, nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah nilai inflasi. Yakni, 2-4 persen saja. Akibatnya, daya beli buruh akan semakin terpuruk. Inflasi sendiri secara umum diperkirakan mencapai 6,5 persen. "Matematika apa yang dipakai Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia, Red)? Tidak berpihak pada buruhnya sendiri," keluhnya.

Serikat pekerja/buruh menyarankan dua dasar hukum yang bisa digunakan oleh pemerintah. Pertama, kembali menggunakan PP 78/2015 yang menyebutkan bahwa kenaikan UM dihitung dari nilai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Kedua, Menaker mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) khusus untuk menetapkan UMP/UMK 2023. Permenaker itu harus mengakomodasi nasib pekerja/buruh. (mia/c6/oni)

CS Copyright © 2023

Jawa Pos



BERBAHAYA: Sejumlah pengendara sepeda motor melewati tanggul penahan lumpur Lapindo. Pengendara memilih jalan pintas karena Jalan Raya Porong ditutup. DIMAS MAULANA/JAWA POS

Pemotor Nekat Naiki Tanggul Lumpur, Imbas Ditutupnya Jalan Raya Porong

Pilih Risiko Jatuh ketimbang Memutar

SIDOARJO - Puluhan pengendara motor nekat melintasi tanggul lumpur di Porong kemarin (16/11). Mereka mencari jalur alternatif karena Jalan Raya Porong ditutup hingga sebulan ke depan.

Saat ditinjau di lokasi, setidaknya sejak pukul 15.00 hingga 16.00 ada lebih dari 60 motor yang melintasi tanggul. Padahal, jalan di atas tanggul kemarin tampak berlumpur dan licin akibat hujan yang mengguyur Sidoarjo sejak

siang. Karena itu, beberapa pengendara tampak kesulitan saat naik tanggul karena jalur yang dibuat warga sekitar cukup curam.

Beberapa di antaranya hampir terpeleset saat mencoba naik ke tanggul. Sementara itu, warga sekitar ikut membantu untuk menurunkan dan menaikkan motor. Nodhor, salah seorang pengendara motor, mengatakan terpaksa lewat jalan tersebut karena lebih cepat dibandingkan memutar. "Lewat arteri bisa, tapi di sini lebih cepat walau sedikit menakutkan," tuturnya.

Akibat pengerjaan perbaikan drainase di bawah Jalan Raya

Porong, jalan tersebut harus ditutup mulai 10 November hingga 15 Desember. Alhasil, dua ruas Jalan Porong yang mengarah ke selatan dan utara ditutup. Di sisi utara sendiri portal beton sudah dipasang 50 meter setelah rel Tanggulangin. Di sisi utara, barrier beton dipasang setelah Pusdik Sabhara Porong.

Walau sudah ada peringatan, tetap saja banyak pengendara motor yang menerobos masuk sehingga harus berjibaku melewati jalan tanah di atas tanggul. Sementara itu, Kapolsek Porong Kumpul Rochsullullah mengatakan, pihaknya bersama

dinas terkait sebenarnya sudah membikin rekayasa lalu lintas. "Sebenarnya, sudah ada petugas yang berjaga untuk rekayasa lalu lintas," ujarnya.

Dalam rekayasa tersebut, kendaraan dari utara dialihkan menuju arteri Porong melalui Jalan Bhayangkara. Dari sisi selatan, kendaraan bisa melalui arteri Porong setelah bundaran Tanggulangin. Di sisi lain, pengendara bisa memutar melewati Tanggulangin menuju Jabon.

Untuk mengantisipasi adanya aksi pemotor yang menaiki tanggul, Polsek Porong kemarin berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo (BPLS) dan pemegang tender proyek untuk menutup akses naik ke atas tanggul lumpur. "Kita koordinasikan dulu agar bisa dipasang barrier beton juga di sana sehingga tidak ada celah warga naik menggunakan motor karena membahayakan," ujar Rochsul

Perwira polisi berpangkat melati satu itu mengimbau agar pengendara lebih baik memutar sedikit untuk menghindari adanya fatalitas dalam berkendaraan. "Apalagi musim hujan, kami akan upayakan lagi agar warga mengikuti rekayasa lalu lintas yang sudah kami buat," tuturnya. (eza/c6/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

P2MD

Dampingi ODGJ Lebih Produktif

SIDOARJO - Himpunan Mahasiswa D-3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Anwar Medika Sidoarjo mencetuskan program pendampingan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hasilnya, ODGJ bisa lebih membaur dengan masyarakat dan produktif.

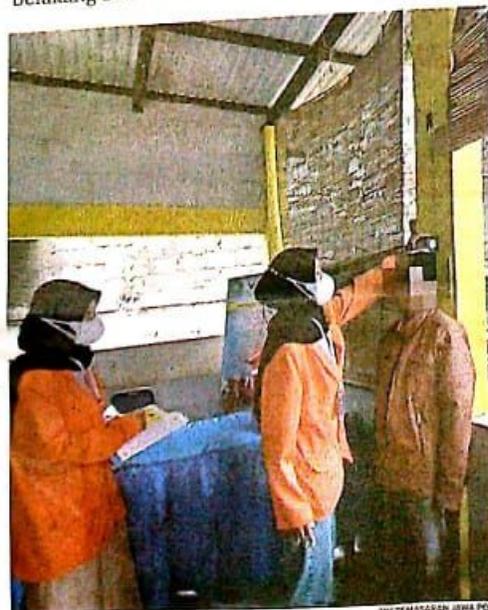
Sasaran mereka adalah ODGJ di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman. Ada 15 ODGJ di sana. Pendampingan mereka lewat program Green Agricultural Practice (GAP).

Yunita Nur Fadilah, ketua pelaksana program pendampingan masyarakat tersebut, mengatakan bahwa pasien ODGJ di sana sebelumnya diberi kegiatan produktif. Misalnya, pembuatan kerajinan tangan dalam kegiatan posyandu jiwa. Namun, menurut dia, belum maksimal. "Kami akhirnya membuat program untuk meningkatkan produktivitas bagi ODGJ dan kualitas hidup bagi pasien ODGJ lewat GAP," katanya kemarin.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) itu pun berhasil lolos hibah program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dengan judul *Penerapan Lifestyle dengan Pendekatan GAP pada ODGJ di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur*.

Program itu, antara lain, berisi kegiatan posyandu jiwa, penanaman bunga telang dan bunga lavender di belakang Balai Desa Sambibulu, pemeriksaan kesehatan, pemantauan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan kunjungan rumah dari pintu ke pintu (KOPIPU). "Selama berjalan sejak Agustus sampai November ini, ada perubahan kualitas hidup para pasien ODGJ," katanya.

Itu terlihat dari adanya salah seorang pasien ODGJ yang antusias membaur dengan masyarakat saat program penanaman bunga, lebih ceria, dan kesehatan mereka semakin terpantau. Mereka juga antusias menghadiri penyuluhan dan program lainnya. "Hari mereka semakin berwarna. Jadi penghilang kebosanan," katanya. Para ODGJ juga lebih produktif karena kerap dilibatkan dalam menanam dan merawat tanaman di taman di belakang balai desa. (uzi/c6/any)



PEDULI SEKITAR: Anggota Himpunan Mahasiswa D-3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Anwar Medika Sidoarjo saat memeriksa kondisi ODGJ di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Adendum Belum Beres, Masih 24 Titik Parkir Yang Dikelola

SIDOARJO – Adendum kerja sama pengelolaan parkir di Sidoarjo hingga kemarin (16/11) belum terwujud. Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo masih mengkaji lebih lanjut.

"Masih dibahas," ujar Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airilangga. Pihaknya masih membahas titik parkir dan kewajiban setoran yang harus dibayarkan pihak ketiga, yakni PT ISS (KSO), ke Pemkab Sidoarjo. Sebab, rencananya ada perubahan setoran karena titik parkir tidak mencapai 359 titik sesuai yang tertuang pada perjanjian kerja sama di awal.

Titik yang klir sesuai hasil kajian Universitas Brawijaya (UB) hanya 87 titik parkir. Ar-



DIMAS MAULANA/JAWA POS

JUKIR MINTA DIAKOMODASI: PT ISS (KSO) belum bisa merangkul juru parkir baru selama adendum parkir belum tuntas.

tinya, ada perbedaan titik. Sementara itu, yang saat ini sudah dikelola PT ISS (KSO) masih 24 titik. Titik lain masih disiapkan.

Karena belum banyak titik yang dikelola, sejumlah jukir di Sidoarjo kemarin meminta rekan-rekannya yang belum diberdayakan segera diakomodasi. Mereka melaporkan langsung ke Kadishub.

Benny meminta para jukir menyerahkan data detail jukir yang belum diakomodasi. "Bisa sampaikan ke kami datanya," katanya.

Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto mengatakan, sampai saat ini masih 48 juru parkir yang diakomodasi pada 24 titik parkir yang mereka kelola. Artinya, di tiap titik ada dua jukir yang bertugas. Pihaknya belum bisa mengakomodasi lebih banyak karena memang layanan perparkiran belum berjalan di semua titik. Jika layanan perparkiran di titik lain berjalan, tentu jukir akan diakomodasi. "Sampai saat ini, kami masih menunggu proses adendum agar ada kejelasan," katanya. (uzi/c7/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



ANAS/RADAR SIDOARJO

SINERGI: Foto bersama Sekretaris Disnaker Happy Setyaningtyas dan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Taman Gatot Krisdiyanto (tiga dari kanan) beserta jajaran HRD dari perusahaan.

BKK SMK Muhammadiyah 1 Taman Bantu Kurangi Pengangguran

TAMAN-SMK Muhammadiyah 1 Taman, Rabu (16/11) menggelar Bursa Kerja Khusus (BKK). Program tersebut mampu menyambungkan kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan pekerjaan. Fokus utamanya adalah mengurangi angka pengangguran.

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Taman Gatot Krisdiyanto, S.

Pd, M.Pd mengetakan, dalam program BKK, siswa yang punya cita-cita bekerja memiliki wadah untuk dipertemukan dengan perusahaan. Dengan begitu siswa bisa menemukan tempat kerja sesuai dengan potensi dan minat.

Sebelum menerjunkan siswa ke dunia kerja, Gatot menyebut pihaknya turut menanamkan karakter siswa. "Bekerjalah

dengan baik, ikhlas, dan jujur, maka prestasi akan mengikuti," pesannya kepada para siswa.

Menurut dia, dengan mendaftarkan dunia usaha dan memberikan penyuluhan, bisa menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja. Di SMK Muhammadiyah 1 Taman ada 300 siswa yang terbagi

● Ke Halaman 10

RADAR
SIDOARJO.ID

BKK SMK Muhammadiyah 1...
dalam lima jurusan. Yaitu perkantoran, akuntansi, teknologi komputer dan jaringan, desain inte-

rior, dan teknik logistik. Ketua BKK SMK Muhammadiyah 1 Taman Aditya Dwi Rahman, S. Kom mengapresiasi antusiasme para siswa yang hadir. Ada 10 perusahaan

yang datang dalam BKK kemarin. Dia berharap kegiatan tersebut bisa diselenggarakan setiap tahun. Selain untuk membantu siswa dan alumni sekolah, juga membantu warga seki-

tar sekolah. Bahkan dia berharap bisa mengadakan sendiri. "Sehingga jadi wadah untuk alumni dan membantu menurunkan angka pengangguran," pungkasnya. (nis/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID

Puluhan Perusahaan Hadiri BKK di SMK YPM 1, 2, dan 3 Taman

TAMAN-Program Bursa Kerja Khusus (BKK) digelar di SMK YPM 1, 2, dan 3 Taman, pada Rabu (16/11). Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh alumni untuk bertemu dengan perusahaan. Total ada 30 perusahaan yang hadir dalam BKK tersebut.

Kepala SMK YPM 3 Taman Drs. H. Hasyim Ashari, M.M mengatakan, dengan adanya BKK, maka ada kesempatan bagi para alumni untuk mengasah ilmunya menjadi tenaga kerja profesional. Selama belajar di sekolah, mereka sudah dibekali keilmuan sesuai dengan program studinya masing-masing.

Dia menjelaskan, di SMK YPM 3 Taman ada tiga jurusan. Yakni DKV, Akuntansi, dan Perkantoran. Total ada 30 perusahaan yang hadir dengan kebutuhan sebanyak 105 karyawan. Program tersebut diharapkan dapat mengentaskan



ANAS/RADAR SIDOARJO

KOMPAK: Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia (tengah) didampingi Kepala SMK YPM 3 Taman Drs. H. Hasyim Ashari, M.M (empat dari kanan), Kepala SMK YPM 1 Taman H Harjono M, Pd (tiga dari kiri) dan Kepala SMK YPM 2 Taman Drs Nurmusolin, M.Si (dua dari kiri) dalam program BKK.

alumni menjadi tenaga kerja yang profesional. "Siswa siap menjadi pekerja yang profesional," katanya.

Hasyim menyebutkan, selama ini pihaknya sudah MoU dengan 80 industri. Ke depan, dengan adanya BKK diharapkan bisa mendekatkan hubu-

ngan dengan perusahaan. Juga meminimalisasi lulusan SMK yang menjadi pengangguran.

Sementara itu, Kepala SMK YPM 2 Taman Drs Nurmusolin, M.Si mengatakan, sekolahnya memiliki tiga jurusan yang bergerak di bidang pariwisata.

● Ke Halaman 10



Puluhan Perusahaan...

Yakni tata boga, perhotelan, dan tata busana. Sejak pariwisata menggeliat lagi usai pandemi Covid-19, perkembangan siswa di bidang perhotelan meningkat. "Dengan adanya BKK ini diharapkan bisa meningkat lagi," katanya.

Dia berharap, selain menghubungkan siswa dengan dunia kerja, BKK juga bisa menguatkan mental siswa. Dengan begitu siswa diharapkan bisa mengembangkan potensinya dan menempati posisi yang sesuai bidangnya.

Kepala SMK YPM 1 Taman H. Harjono M.Pd menyebutkan, sebagai sekolah pusat keunggulan, pihaknya juga menjajaki konsentrasi kerja sama dengan luar negeri. Secara umum pihaknya sudah menjalin

MoU dengan 125 perusahaan.

Menurut dia, adanya BKK juga bisa membuka wawasan para siswa terhadap dunia kerja. Juga agar meningkatkan daya saing mereka. "Daya juang juga ikut meningkat, jangan sampai menyia-nyia-

kesempatan bekerja hanya karena lokasinya berbeda kecamatan dengan tempat tinggal," ujarnya.

Kepala Disnaker Sidoarjo Ainun Amalia menjelaskan, pada Agustus 2022 angka pengangguran turun menjadi 8,80 persen. Sebelumnya

ada di angka 10,87 persen. Upaya dan usaha bersama antara Pemkab dan SMK turut menyumbang dalam penurunan angka tersebut.

"Ke depan semoga tetap membangun kegiatan yang bersifat vokasi," pungkasnya. (nis/vga)

iklan baris
DeltaCekli

PEMASANGAN IKLAN

Hubungi: Erta 081252048001

Telepon Kantor: 031 895 7687.

Alamat: Jl Jenggolo, Ruko Graha Niaga Kav.

A1 No. 3 Sitwanpanji - Buduran - Sidoarjo



KEHILANGAN

HILANG STNK MOTOR HONDA
NOPOL W 6351 NCT A/N NASIR
D/A DESA PRASUNG RT 02 RW
01 KEC BUDURAN SIDOARJO

PEMBERITAHUAN

Diharapkan kepada pembaca Radar Sidoarjo untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui sarana iklan. Modus penipuan yang terjadi, calon pembeli diharuskan mentransfer senilai barang yang diminati dan barang yang dipesan akan segera dikirim oleh pihak penjual. Radar Sidoarjo tidak bertanggungjawab terhadap semua transaksi atas

pemuatan iklan. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Ttd, Manajer





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KESEHATAN

Ada 175 Kasus Aktif Covid-19, Capaian Booster Hanya 34 Persen

KOTA-Adanya varian baru Covid-19 XBB membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) lagi.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Sidoarjo M Athoillah mengatakan, untuk menentukan varian omicron XBB diperlukan pemeriksaan khusus

● Ke Halaman 10



Ada 175 Kasus...

di laboratorium. Hingga saat ini belum ada laporan dari laboratorium pemeriksa. Namun, diakuinya dalam dua hingga tiga minggu terakhir ada peningkatan kasus. "Mulai dari yang tidak bergejala hingga gejala ringan," katanya.

Dia menyebutkan, hingga Selasa (15/11) ada 175 kasus aktif Covid-19.

Diharapkan angka tersebut tidak terus meningkat. Upaya pencegahan penularan pun akan terus dilakukan oleh Dinkes.

Namun, dia meminta kesadaran dari masyarakat juga. Selain terus menjaga dan memperketat prokes, diharapkan masyarakat segera booster. Sebab hingga saat ini capaian vaksinasi booster untuk Covid-19 baru 34 persen.

Hal itu karena selain untuk melindungi diri sendiri juga untuk menciptakan herd immunity yang lebih tinggi. Padahal Dinkes sudah menyiapkan vaksinasi booster di semua puskesmas di Sidoarjo.

"Setiap hari ada, bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Menurut Atho, daya serang varian XBB terhadap pasien lebih rendah dari varian sebelumnya.

Kondisi ini membuat pasien lebih cepat sembuh. "Biasanya sembuh dalam tiga hingga lima hari," imbuhnya.

Meski bisa cepat sembuh, penularannya juga bisa sangat cepat. Untuk itu dia meminta masyarakat tetap waspada dan menerapkan 5M. Yakni rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. (nis/vga)



Antisipasi Penyebaran Covid-19

Polresta Sidoarjo Kembali Masifkan Vaksinasi

Sidoarjo, Memorandum

Adanya penambahan kasus virus corona (Covid-19) harian di Indonesia, beberapa hari terakhir mulai menunjukkan tren peningkatan, membuat Polresta Sidoarjo kembali mengencangkan vaksinasi Covid-19.

Seperti disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, Rabu (16/11) siang, saat meninjau vaksinasi di gerai vaksinasi Polresta Sidoarjo Taman Pinang Indah.

"Covid-19 kembali meningkat, tentu harus kita antisipasi dengan menggiatkan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga," ujarnya.

Melalui masifnya vaksinasi Covid-19 diharapkan herd immunity masyarakat semakin kuat. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatannya di tengah cuaca tak menentu belakangan ini. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sementara untuk stok vaksin Covid-19 termasuk dosis ketiga, menurut Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro di wilayah Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih aman.

Dalam kesempatan meninjau layanan vaksinasi Covid-19 di gerai vaksin Taman Pinang Indah, Kapolresta Sidoarjo juga membagikan 300 paket sembako kepada masyarakat. (jok/day)



Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro meninjau gerai vaksin.

Rencana Adendum Kerja Sama Parkir Diminta Perhatikan Nasib Jukir



PEMASUKAN: Parkir di Stadion Gelora Delta yang sudah dikelola pihak ketiga.

KOTA-Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo masih belum melakukan adendum kontrak kerja sama pengelolaan parkir di Sidoarjo dengan pihak ketiga. Rencana adendum itu malah mendapat masukan dari sejumlah juru parkir (jukir) di Sidoarjo, Rabu (16/11).

Perwakilan jukir mengharapkan rencana adendum itu tetap mempertahankan 359 titik parkir lama yang ada. Termasuk memperhatikan para jukir yang sudah biasa bekerja di Sidoarjo. "Harapannya ada kesepakatan yang tidak meru-

gikan kedua belah pihak. Antara pihak ketiga dan jukir," jelas Aziz, perwakilan jukir.

Saat ini, pengelolaan parkir di Sidoarjo memang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian kerjasama (PKS) awal, ada 359 titik parkir yang bakal dikelola pihak ketiga. Tapi saat berjalan, jumlah titik parkir yang ada tidak sesuai.

Dishub juga telah bekerja sama dengan tim ahli untuk mengkaji titik parkir di Sidoarjo. Rekomendasinya ada 87 titik parkir yang memang potensial.

Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga mengungkapkan, pihaknya juga terbuka terkait masukan dari kelompok perwakilan para jukir itu. Mereka dipersilahkan untuk menyampaikan data titik parkir yang ada.

Namun, Dishub juga tetap melakukan pendataan dan verifikasi yang tepat. Termasuk mempertimbangkan hasil kajian dari tim ahli. "Jangan sampai lahan parkir yang dimaksud masuk dalam pengelolaan bidang pajak parkir bukan retribusi parkir," jelasnya.

Proses adendum PKS dengan pihak ketiga saat ini juga masih dipersiapkan. Selain memperbarui soal titik parkir, adendum itu juga akan membahas terkait kewajiban setoran yang harus dibayarkan pihak ketiga ke Pemkab Sidoarjo.

Dalam kontrak awal, pihak ketiga ada kewajiban menyeter ke kas daerah sebesar Rp 32,09 miliar. Dengan asumsi mengelola 359 titik parkir. Karena jumlah titik parkir berubah, pihak ketiga juga diharapkan ada penyesuaian setoran. (son/vga)



PEPARPEDA Perdana Tuntas, Sidoarjo Raih Tiga Emas



LUAR BIASA: Pemberian medali pada atlet PEPARPEDA.

KOTA-Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) I Jawa Timur 2022 telah tuntas digelar. Hasilnya, kontingen Sidoarjo masih belum berhasil masuk lima besar.

Dalam PEPARPEDA perdana itu, kontingen Kota Kediri yang berhasil menjadi juara umum. Mereka berhasil memborong sembilan medali emas, lima perak dan tiga perunggu.

Untuk posisi runner-up berhasil diraih oleh kontingen Kabupaten Mojokerto. Yakni dengan perolehan tujuh medali emas dan empat perak.

Sementara Sidoarjo baru berhasil mengantongi tiga medali emas, tiga perak, dua perunggu. Dengan perolehan itu, tuan rumah berada di posisi ke sembilan.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo Djoko Supriyadi mengungkapkan, Sidoarjo memang belum mampu menjadi juara umum, tetapi setidaknya pelaksanaan PEPARPEDA perdana itu dapat berjalan dengan lancar.

"Ini loncatan baru, karena atlet pelajar disabilitas dan non disabilitas dapat beriringan," katanya.

Tentu banyak hal yang menyebabkan Sidoarjo belum mampu menjadi juara umum. Mulai dari faktor jumlah atlet dan persiapan. Sidoarjo mengirimkan 15 atlet dalam ajang PEPARPEDA itu.

Menurut Djoko prestasi yang dicapai para atlet di PEPARPEDA ini jauh lebih hebat. Mereka dengan kondisi tidak biasa tapi mampu menorehkan prestasi luar biasa. "Disabilitas itu tidak untuk diberi kasihan tapi diberi kesempatan yang sama," tegasnya. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Uncategorized

Sidoarjo Bebaskan Denda 9 Jenis Pajak Daerah

by cakrajatim — 16 November 2022



Sidoarjo, 17 November: Bupati Sidoarjo menerbitkan keputusan nomor: 188/549/438.1.1.3/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke-164.

Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, menjelaskan, Penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023. Sehingga, Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2022 dapat membayar tanpa dikenakan sanksi administratif.

CakraJatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jenis pajak yang dilakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda, meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila tidak terdapat pembebasan sanksi administratif ini, Wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang harus dibayarkan.

Oleh karena itu, dengan adanya momentum pembebasan sanksi administratif ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk melunasi utang pajaknya.

Pembayaran pajak daerah Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline, seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank OCBC NISP, Alfamart, Indomaret, e-commerce dan berbagai kanal lainnya serta yang terbaru yaitu tempat pembayaran pajak melalui BUMDes pada masing-masing Desa/Kecamatan.

hs

⇒ **CakraJatim.com**

Hore Pemkab Sidoarjo Bebaskan 9 Jenis Pajak Daerah Selama 5 Bulan Ke Depan

REDAKSI 16 NOVEMBER 2022 15:46:56



BEBAS DENDA - Inilah daftar 9 Denda Pajak Daerah yang dibebaskan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo hingga 5 bulan ke depan, Rabu (16/11/2022).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo mulai membebaskan denda 9 jenis pajak daerah. Pembahasan denda pajak daerah ini menyusul, terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo Nomor 188/549/438.1.1.3/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke 164.

"Penghapusan sanksi administratif ini berlaku sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 mendatang," ujar Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono kepada republikjatim.com, Rabu (16/11/2022) sore.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ari yang juga mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemkab Sidoarjo ini menjelaskan bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2022 dapat membayar tanpa dikenakan sanksi administratif atau berupa denda itu.

"Karena itu, selama adanya waktu pembebasan denda pajak itu diharapkan WP segera menyelesaikan kewajibannya dengan segera membayar pajak daerah yang menjadi tanggungannya itu," imbuhnya.

Sejumlah jenis pajak yang dilakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda ini, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Kalau tidak terdapat pembebasan sanksi administratif ini, Wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebesar 2 persen per bulan dari pokok pajak yang harus dibayarkan," tegas Ari Suryono yang juga salah calon Sekda Sidoarjo ini.

Karena itu, dengan adanya momentum pembebasan sanksi administratif ini, Aru menghimbau dan berharap wajib pajak bisa segera memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan pembebasan denda itu. Terutama bagi masyarakat agar segera melunasi hutang pajaknya.

"Pembayaran pajak daerah Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline. Seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank OCBC NISP, Alfamart, Indomaret, e-commerce dan berbagai kanal lainnya. Selain itu, yang terbaru tempat pembayaran pajak melalui BUMDes pada masing-masing Desa/Kecamatan," tandasnya. Hel/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Pemerintahan

Buruh Sidoarjo Minta Ada Kenaikan Upah 2023 Sebesar 13 Persen, Begini Respons Disnaker Sidoarjo

Penetapan UMK merupakan usulan Disnaker ke Bupati untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Timur

Selasa, 15 November 2022 | 18:13



Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia



KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pembahasan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2023 masih berlangsung. Berseiring dengan pembahasan itu, sejumlah serikat buruh di Sidoarjo mengharapkan ada kenaikan untuk nilai UMK 2023 besok sebesar 13 persen.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, Ainun Amalia menyampaikan, pedoman dewan pengupahan Sidoarjo dalam pembahasan UMK itu adalah PP 36 tahun 2021. Sehingga apa yang menjadi aspirasi para buruh itu nantinya akan disampaikan pada Bupati Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Karena apa? Penetapan UMK merupakan usulan yang kami sampaikan ke Bupati untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Timur. Jadi kami dalam rapat pengusulan UMK 2023 ini masih mengacu pada PP 36 tahun 2021," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (15/11/2022).

Sebagai informasi, PP 36 tahun 2021 itu mengatur perihal pengupahan. Dalam PP tersebut, tepatnya di bagian tiga pasal 33 poin nomor 2 disebutkan, hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Artinya, kebijakan UMK dalam PP 36 tahun 2021 itu nantinya akan diputuskan oleh gubernur. Kemudian dalam pengaplikasiannya, gubernur akan mengeluarkan surat keputusan gubernur untuk menjadi dasar penerapan UMK di tingkatan kabupaten atau kota. Surat keputusan gubernur itu dalam PP tersebut disebut harus dikeluarkan maksimal tanggal 30 November.

Sebelumnya diberitakan, serikat buruh di Sidoarjo mengharapkan ada kenaikan upah pada tahun 2023 mendatang. Kenaikan ini disebut paling tidak sebesar 13 persen.

Permintaan untuk menaikkan nilai UMK ini disebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya terkait kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga beli BBM bersubsidi.
(Dimas)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Pemerintahan

KPU Sidoarjo Sosialisasikan Aplikasi SIKBA, Pendaftaran Badan Ad Hoc

Rabu, 16 November 2022 | 04:58



Ilustrasi aplikasi SIKBA/ foto : Istimewa



KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo bakal meluncurkan sebuah aplikasi untuk pendaftaran badan Ad hoc di Sidoarjo. Aplikasi itu bernama Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad hoc (SIKBA).

Disampaikan oleh Ketua KPU Sidoarjo ,M. Iskak, peluncuran aplikasi itu merupakan salah satu ketentuan baru yang harus dilakukan KPU dalam pembentukan badan Ad hoc pemilu 2024. Selain aplikasi, ketentuan yang terbaru adalah pembatasan usia maksimal 55 tahun.

“Aplikasi itu fungsinya sebagai pendaftaran digital. Selain itu, di aplikasi itu nantinya bakal diketahui apakah yang mendaftar terlibat sebagai pengurus parpol atau tidak,” kata Iskak beberapa hari lalu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Iskak menambahkan, menurutnya, KPU Sidoarjo juga telah berkoordinasi dengan para camat se-Sidoarjo terkait pembentukan badan Ad hoc ini. Tujuannya ialah agar para camat juga bisa membantu mensosialisasikan pembentukan Ad hoc ini.

“Pendaftarannya dimulai tanggal 16 November nanti dengan kriteria usia maksimal 55 tahun,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, badan Ad hoc yang akan dibentuk itu nantinya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“90 orang nanti akan disebar di masing-masing kecamatan dalam kategori PPK. 1.047 orang dalam kategori PPS untuk 349 desa se-Sidoarjo. Lalu untuk KPPS ada 7 orang untuk masing-masing TPS se-Sidoarjo,” ujarnya. (Dimas)

